

**INDUSTRI INDIGO DI KABUPATEN CIREBON
PADA MASA SISTEM TANAM PAKSA (1830-1870)**

Awaludin Nugraha, Kunto Sofianto, dan R.M. Mulyadi
Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
Jatinangor, Bandung 40600

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasi industri bahan pewarna alam yang dikenal dengan indigo atau tarum di Kabupaten Cirebon pada tahun 1830 sampai 1870, yaitu ketika Sistem Tanam Paksa diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda memaksa penduduk pribumi di kabupaten tersebut untuk menjalankan industri indigo. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana beroperasinya industri tersebut di Kabupaten Cirebon dan sampai sejauh mana dampak yang ditimbulkannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode sejarah, karena peristiwanya sudah terjadi sekitar 1,5 abad yang lalu. Dari penelitian ini bahwa industri indigo di Kabupaten Cirebon pada masa Sistem Tanam Paksa mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi Kerajaan Belanda dan sangat menyengsarakan bagi petani di kabupaten tersebut. Industri ini juga memberi keuntungan bagi para pejabat local pribumi dan sikep-sikep kaya di kabupaten tersebut, sehingga menimbulkan diferensi ekonomi yang semakin tajam antara pejabat local pribumi dan sikep-sikep kaya dengan petani. Dengan demikian, maka Kabupaten Cirebon telah dijadikan sebagai daerah satelit untuk mencari keuntungan ekonomi oleh Kerajaan Belanda yang bertindak sebagai negara metropolis dan pemilik modal, yang dalam hal ini modalnya berupa kekuasaan bukan materi.

Kata kunci : Tanam paksa, tarum, dampak, sikep, daerah satelit, metropolis

**THE INDIGO INDUSTRY IN CIREBON REGENCY
AT THE TIME OF COMPULSARY CULTIVATION SYSTEM 1830-1870**

ABSTRAK

The objective of this research is to reconstruct the dyestuff industri known as indigo or tarum, in Cirebon regency in 1830-1870, namely in the period of Compulsary Cultivation System. At that period, the Netherlands Indies government forced indigenous people in that regency to operate the indigo industry. Focus of this research was directed to know how the process in that industry in Cirebon regency went on and how far it inflicted towards social-economic life in Cirebon regency. The method used in this research is historical method. This research shows that the indigo industry in Cirebon regency in the period of compulsary Cultivation System wreaked major benefit to the

Netherlands on one hand and on the other hand it really impoverished the peasants in the regency. This industry on also gave benefit to the local indigenous government officials and the rich **sikeps** in that regency, therefore it effected more a wide-ranging of economic differentiation between the local indigenous government officials and the rich **sikeps** in one hand the peasants in the other hand. The Netherlands engineered Cirebon regency as satellite region to get economic benefit. The Netherlands acted as metropolis country and capitalist, in this case its capital was a power not a material.

Keywords : Compulsary cultivation system, indigo, sikep, Satellite regency, metropolis

PENDAHULUAN

Pada dekade ketiga abad ke-19, Kerajaan Belanda mengalami kesulitan keuangan. Hal ini antara lain akibat terjadinya Perang Diponegoro (1825-1830) yang banyak menelan biaya dan tidak lancarnya pemasukan pajak tanah. Kesulitan keuangan ini bertambah parah dengan terjadinya pemisahan Belgia (1830). Akibat pemisahan Belgia ini, Kerajaan Belanda banyak kehilangan industrinya dan juga hilangnya sumber keuangan yang berupa tanah domein di Belgia. Untuk mengatasi kesulitan keuangan ini dan supaya Kerajaan Belanda tidak jatuh bangkrut, J. van den Bosch mengusulkan untuk melaksanakan *cultuurstelsel* (Sistem Tanam Paksa) di Hindia Belanda (Gonggrijp, 1949:116-119). Menurut Sistem Tanam Paksa, pungutan dari rakyat tidak lagi berupa uang seperti masa pemerintahan Rafles, tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor. Jenis tanaman ekspor utama yang wajib ditanam rakyat adalah kopi, tebu, dan indigo. Ketiga komoditastersebut merupakan komoditas yang penting di Eropa pada masa itu (Gonggrijp, 1949:115-166; Fasseur, 1992:27).

Indigo adalah tanaman bahan baku pewarna biru yang biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil. Untuk menjadi bahan pewarna diperlukan pemrosesan di pabrik. Indigosebagai bahan pewarna sudah diproduksi sejak lama oleh masyarakat Jawa, jauh sebelummasa Sistem Tanam Paksa. Salah satu daerah yang sudah mengenal indigo sejak lama adalah Kabupaten Cirebon, sebagaimana diungkapkan Raffles bahwa Cirebon merupakan penghasil sumber-sumber alam yang besar, seperti indigo, kopi, dan kayu jati (Raffles, 1988, II:250). Produksi indigo ini kemudian diperluas dan diintensifkan lagi pada masa Sistem Tanam Paksa. Di Kabupaten Cirebon, produksi indigo pada masa Sistem Tanam Paksa dilakukan sejak tahun 1830 sampai tahun 1864.

"Bagaimanakah pelaksanaan industri indigo di Kabupaten Cirebon pada masa Sistem Tanam Paksa dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya?" dalam penelitian ini, pertanyaan tersebut akan dicoba untuk dijawab.

Kerangka Konseptual

Berbicara tentang industri indigo di Kabupaten Cirebon pada masa Sistem Tanam Paksa tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara negara penjajah dan

negara jajahan. Salah seorang yang membicarakan hubungan antara negara penjajah adalah Andre Gunder Frank (1969) dalam bukunya yang berjudul *Capitalism and Under development in Latin America*. Ia mengemukakan bahwa hubungan antara negara metropolis (negara penjajah) dengan negara satelit (negara dijajah) akan menghasilkan pembangunan keterbelakangan atau *the development of underdevelopment*. Keterbelakangan terjadi di negara satelit adalah akibat langsung dari terjadinya pembangunan di negara metropolis.

Pembangunan di negara metropolis dibiayai dari kegiatan ekonominya di negara satelit. Borjuis di negara metropolis yang bertindak sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pejabat pemerintah di negara satelit dan kaum borjuis yang dominan di sana untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagai akibat dari kerjasama ini, munculah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan borjuis local, dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak di negara satelit. Kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan yang menghasilkan keterbelakangan, karena kemakmuran bagi rakyat jelata dinomorduakan. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara satelit hanya akan menguntungkan modal asing dan kepentingan pribadi dari kaum borjuis local.

Sebagai negara penjajah, Belanda berupaya mengatasi masalah keuangan dengan melakukan kegiatan ekonomi di Jawa, termasuk di Kabupaten Cirebon. Upaya yang dilakukannya adalah dengan memaksa penduduk pedesaan Jawa untuk memproduksi komoditas yang laku dijual di pasaran Eropa, komoditas ekspor yang diusahakan oleh Belanda di Jawa antara lain indigo. Indigo adalah barang hasil proses produksi. Dalam proses produksi bekerja semua unsur faktor produksi secara bersamaan. Ada empat unsur faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewiraswastaan atau manajemen. Unsur kewiraswastaan atau manajemen berfungsi mengkoordinasikan ketiga unsur faktor produksi lain, sehingga dapat mengeluarkan hasil produksi (Mubyarto, 1986:59).

Pada masa Sistem Tanam Paksa, modal dimiliki oleh pemerintah Belanda, sedangkan manajemen produksi harus dilihat dari kerangka imperialisme dan kolonialisme Belanda di Jawa. Dengan demikian, maka manajemen produksi atau barang, termasuk indigo, harus dilihat dalam hubungan system perekonomian kolonial yang bertujuan untuk mengeksploitasi daerah jajahan untuk kepentingan negeri penjajah. Dalam hal ini yang dieksploitasi adalah tanah dan tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digarap ini merupakan penelitian sejarah. Oleh karena itu metode penelitian yang dipergunakannya pun menggunakan metode sejarah. Ada empat tahapan kerja dalam metode sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah proses pencarian dan pengumpulan sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan

sumber dilakukan pada sejumlah sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, yaitu berupa arsip-arsip kolonial, artikel-artikel sezaman dan buku-buku. Kemudian sumber-sumber yang dikumpulkan itu direvivikasi melalui kritik, baik eksteren maupun intern. Kritik eksteren digunakan untuk menentukan keabsahan data, sedangkan kritik intern diperlukan guna menilai kelayakan data. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasi atau dianalisis dan disintesis. Selanjutnya dilakukan tahapan terakhir, yaitu penulisan atau historiografi.

Untuk mencari hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan industri indigo di Kabupaten Cirebon, maka perlu dilihat terlebih dahulu kondisi geografis dan masyarakat Kabupaten itu sebelum dijalankan industri indigo secara intensif. Selanjutnya dikemukakan tentang sistem eksploitasi kolonial yang berkaitan dengan pelaksanaan industri indigo. Hal ini menyangkut penggunaan tanah, tenaga kerja, proses produksi dan perkembangannya. Semua ini ditempatkan dalam dimensi waktu, sehingga dapat diamati tahap-tahap perkembangannya.

Kabupaten Cirebon Sampai Masa Sistem Tanam Paksa

Kabupaten Cirebon mempunyai luas wilayah 633 pal persegi (1.437,5 km²) dengan batas-batasnya ditentukan sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Maja, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, sebelah timur berbatasan dengan Karesidenan Tegal, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Secara geografis Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian antara 0 – 2000 meter di atas permukaan air laut, dengan rata-rata curah hujan setiap tahun sebesar 2.257 mm dan rata-rata jumlah hari hujan per tahun 127 hari (Lekkerkerker, 1938: 83-84).

Pembentukan Kabupaten Cirebon didasarkan pada Besluit Komisaris Jenderal Hindia Belanda tanggal 5 Januari 1819 no.23. Berdasarkan besluit itu Kabupaten Cirebon termasuk ke dalam Karesidenan Cirebon (Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1891 No.9). Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang bupati dengan "didampingi" oleh asisten residen yang berfungsi sebagai wakil pemerintah Belanda di tingkat kabupaten. Bupati dan bawahannya berfungsi sebagai wakil pemerintah Belanda di tingkat kabupaten. Bupati dan bawahannya berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah Belanda dengan rakyat pribumi.

Pada tahun 1830-an Kabupaten Cirebon terdiri dari delapan distrik, yaitu Cirebon, Plumbon, Beber, Lossari, Mandirancan, Sindang Laut, Gegesik Lor, dan Surananggala. Penambahan distrik terjadi pada tahun 1862, ketika Distrik Palimanan dipindahkan dari Kabupaten Majalengka ke Kabupaten Cirebon. Distrik-distrik itu dikepalai oleh seorang *wedana* didampingi *kontroleur* yang berfungsi sebagai wakil pemerintah Belanda di tingkat distrik.

Masing-masing distrik terdiri dari beberapa desa. Pada tahun 1837 desa di Kabupaten Cirebon berjumlah 363 desa. Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut *kuwu*. Dalam menjalankan tugasnya, *kuwu* dibantu oleh perangkat desa yang disebut orang balai. Mereka terdiri dari dua orang wakil

kuwu yang bertugas menjalankan pemerintahan umum yang dinamakan *ngabehi* dan *babau*; seorang wakil kuwu yang bertugas dalam urusan persawahan; lembang yang bertugas untuk mengatur kewajiban pelayanan umum; *kabayan* yang bertanggung jawab terhadap makanan bagi para pekerja wajib umum (*heerendiensten*); kepala jalan yang bertugas memelihara jalan; dan *majior* yang bertugas memelihara irigasi (Fernando, 1982;50). *Kuwu* dan *orang balai* dipilih oleh warga desa dari *sikep-sikep* yang terkemuka.

Struktur penduduk pedesaan berdasarkan pada pemilikan tanah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu *sikep*, *tangkong*, dan *manumpang*. *Sikep* yang merupakan tingkatan sosial tertinggi, mempunyai hak menguasai dan mengolah tanah *kasikepan*. Tanah *kasikepan* adalah tanah milik desa yang pemanfaatannya diserahkan kepada *sikep* dan dapat diwariskan. Sebagai imbalannya, *sikep* menanggung berbagai kewajiban, seperti membayar pajak, membagi tanah kepada penduduk desa, menyediakan tenaga kerja bagi pekerjaan umum, dan kerja wajib di desanya. Untuk mengolah tanah *kasikepan* itu, *sikep* dapat mengerjakan golongan *manumpang*. Sebagai golongan terkemuka di desanya, *sikep* mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai *kuwu* (kepala desa). Kelompok *tangkong* atau disebut juga *kuren kuat* ialah penduduk desa yang memiliki rumah dan pekarangan, tetapi tidak mempunyai kasikepan. Kelompok ketiga, yaitu *manumpang* atau disebut juga *wuwung* ialah mereka yang tidak memiliki tanah sama sekali dan mereka menumpang pada *sikep*. Dalam kelompok ketiga ini juga termasuk *bujang* (Fernando, 1982: 46-50; Ekajati, 1995: 221-226).

Perekonomian masyarakat pedesaan di Kabupaten Cirebon pada masa sebelum Sistem Tanam Paksa diberlakukan ke dalam kelompok system ekonomi tradisi. Hal ini berarti bahwa upaya untuk memecahkan persoalan ekonominya dilakukan melalui lembaga-lembaga sosialnya. Dipulau Jawa, lembaga-lembaga sosial yang dimaksud, dinamakan oleh Burger (1962: 93-94) sebagai ikatan desa. Ikatan desa adalah suatu ikatan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa yang merupakan perpaduan antara ikatan (antarhubungan) yang horizontal dengan vertical. Ikatan horizontal adalah suatu ikatan antaranggota masyarakat dengan pimpinannya yang diwujudkan dengan rasa tunduk kepada pemimpin mereka.

Dalam masyarakat yang perekonomiannya diatur secara tradisional, pada umumnya mereka mengarahkan faktor produksi dan hasil produksinya hanya untuk memenuhi konsumsi sendiri dan hampir tidak diperjualbelikan. Akibat tidak ada lalu lintas pertukaran barang. Jadi, usaha mereka bukan merupakan usaha ekonomi, sehingga tidak memungkinkan untuk lahirnya pasar. Dalam system perekonomian tradisi, perekonomian masyarakatnya akan bersifat statis. Perubahan akan terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan dalam kualitas serta kuantitas perubahan yang sedikit sekali (Heilbroner, 1982: 36-38).

Pada umumnya masyarakat yang hidup dalam system ekonomi tradisi adalah masyarakat petani yang menggantungkan hidup mereka pada sector pertanian.

Mereka sangat memperhatikan keseimbangan dengan alam sekitarnya dan keseimbangan antara produksi dengan konsumsi (Vries,1972:12;Boeke,1983:24).

Kebijakan Eksploitasi Kolonial

Pada tiga dekade pertama abad ke-19, ekonomi Kerajaan Belanda mengalami kehancuran. Untuk mengatasi masalah ekonomi ini, daerah koloni dijadikan sebagai alternatif pemecahan yang diharapkan. Segala daya dicurahkan untuk mengelola wilayah ini supaya segera menghasilkan keuntungan. Pada tahun 1829 Johannes van den Bosch menyampaikan kepada raja Belanda usulan-usulan yang kelak akan disebut *cultuurstelsel* (Sistem Tanam Paksa). Raja Belanda menyetujui usulan-usulan Johannes van den Bosch itu yang kemudian mengangkatnya sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda untuk menjalankan usulan-usulannya itu.

Konsep J. van den Bosch mengenai Sistem Tanam Paksa pada awalnya tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Sistem tersebut didasarkan pada suatu prinsip bahwa desa-desa di Jawa mempunyai utang pajak tanah (*landrente*) kepada pemerintah. Untuk membayar pajak tersebut setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditas ekspor untuk dijual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan.

Untuk menjalankan konsepnya itu, J. van den Bosch menggabungkan prinsip wajib atau paksa dengan prinsip monopoli. Prinsip yang pertama dipergunakan menurut model yang telah lama berjalan di Priangan yang dikenal dengan *Preangerstelsel* atau system yang dipakai oleh VOC yang dikenal dengan (penyerahan wajib). Diterapkannya prinsip yang pertama ini berkaitan dengan pemikiran J. vanden Bosch yang menganggap bahwa bila diterapkan ekonomi system bebas, masyarakat desa yang mayoritas adalah petani, akan enggan untuk diajak menanam tanaman ekspor yang menjadi bahan perdagangan utama untuk mengisi kas keuangan pemerintah. Oleh karena itu, petani sebaiknya diwajibkan dalam menanam tanaman ekspor itu (Vlekke, 1967:290).

Prinsip kedua, yaitu monopoli, diberikan kepada perusahaan dagang Belanda NHM (*Nederlandsche Handels Maatschppij*) yang didirikan pada tahun 1825 atas prakarsa raja Belanda. NHM diberi hak monopoli untuk mengangkut dan memperdagangkan komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat pedesaan. Dengan demikian, maka akan mematahkan dominasi pelayaran Inggris-Amerika di kawasan Malaya-Hindia Belanda dan dengan sendirinya akan mendatangkan pemasukan keuangan bagi pemerintah Belanda (Kratodirdjo, 1987; Ricklefs, 1994: 184-185).

Menurut konsep Sistem Tanam Paksa, seperti yang dicatat dalam Staatsblad van Nederlandsch – Indie 1834 No. 22, pemerintah akan mengadakan perjanjian dengan penduduk desa mengenai penyerahan sebagian dari sawahnya untuk keperluan penanaman tanaman bagi pasaran Eropa. Tanah yang akan diserahkan itu luasnya 20% dari luas seluruh sawah sebuah desa dan tanah tersebut akan dibebaskan dari pajak tanah (*landrente*). Hasil tanaman harus diserahkan kepada

pemerintah dan apabila harga yang ditaksir ternyata lebih tinggi daripada jumlah *landrente* yang harus dibayarkan, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada penduduk. Jika panen gagal, maka resiko akan ditanggung oleh pemerintah, asalkan kegagalan itu tidak disebabkan karena kelalaian penduduk. Tenaga yang akan menanam tanaman ekspor tidak boleh melebihi tenaga yang diperlukan untuk penanaman padi. Mereka akan bekerja selama 66 hari dan kepadanya akan diberikan "remuneratie" (upah) dalam bentuk uang pada waktu mereka menyerahkan hasilnya. Mereka akan bekerja di bawah pimpinan kepala-kepala mereka (kepala desa) dan akan diawasi oleh pejabat Eropa (residen dan bawahannya).

Tanaman ekspor yang ditanam oleh penduduk desa adalah indigo dan tebu, di samping kopi yang telah berjalan. Ketiga tanaman itu merupakan komoditas yang sedang laku dipasaran Eropa pada waktu itu. Tidak seperti kopi yang hasil panennya bisa langsung dipasarkan, hasil panen tanaman indigo dan tebu tidak dapat langsung dipasarkan, tetapi harus diolah dulu di pabrik sampai menghasilkan komoditas uyang diinginkan. Tanaman indigodiolah menjadi bahan pewarna, sedangkan tanaman tebu diolah menjadi bahan pewarna, sedangkan tanaman tebu diolah menjadi gula. Warna yang dihasilkan dari tanaman indigo adalah biru tua dan biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil.

Industri Indigo Di Kabupaten Cirebon

Pewarna biru indigo didapatkan dari indoksil yang terdapat dalam daun tanaman indigo. Untuk memperoleh indoksil itu dari daunnya diperlukan proses hidrolis glukosida tak berwarna. Indoksil ini kemudian dioksidasi dengan udara. Oksidasi dengan udara mengubah indoksil menjadi indigo yang berwarna biru tua dengan rumus kimia $C_{16}H_{10}N_2O_2$ (Campagne, 1919:653).

Tanaman indigo yang dapat menghasilkan bahan pewarna termasuk ke dalam *family Leguminosae* dan genus *Indigofera*. Tanaman ini dapat tumbuh pada iklim basah dengan rata-rata curah hujan tidak kurang dari 1.750 mm per tahun dan pada ketinggian sampai 1.650 m di atas permukaan air laut. Ketika tanam paksa indigo diberlakukan di Kabupaten Cirebon, tanaman indigo yang dibudidayakan diambil dari jenis Tarum Kembang yang merupakan jenis asli dari Jawa. Tarum Kembang sejenis dengan species *Indigofera Antil LINN (Indigofera Suffruticosa MILL)* (Waal, 1845: 56; Graaf en Stibbe, 1918, II: 137).

Kondisi geografis Kabupaten Cirebon sangat kondusif untuk menanam tanaman indigo, sehingga tidak mengherankan bila indigo sudah diproduksi sebelum VOC berkuasa di Kabupaten ini. Pada masa awal Sistem Tanam Paksa, areal penanaman indigo disiapkan di dua distrik, yaitu Distrik Cirebon dan Beber dengan luas 784,2 bau (556,5 ha). Tanah-tanah yang disiapkan itu bukan di sawah-sawah sekitar kampung, tetapi tanah-tanah yang tidak dipakai untuk menenam tanaman konsumsi penduduk yang letaknya jauh dari kampung. Jauhnya jarak antara kampung petani penanam indigo dengan areal penanamnya sering menimbulkan masalah pada petani penanam. Pada perkembangan

berikutnya, areal tersebut diperluas untuk meningkatkan produksi, sehingga pada tahun 1832 luasnya meningkat 7,6% menjadi 844 bau (599 ha) dan distrik yang mencakup pun bertambah dua distrik, yaitu Distrik Plumbon dan Surananggala.

Untuk mengolah daun indigo menjadi bahan pewarna, di ibukota Distrik Cirebon dan Beber didirikan pabrik indigo. Dalam pabrik itu terdapat tempat pemasakan, penyaringan, penimbangan, dan pengepakan. Anggaran untuk pembuatan pabrik itu disediakan pemerintah, baik untuk pembelian material maupun pembayaran buruhnya (Bleeker, 1865: 408).

Dengan peningkatan luas areal penanaman seperti yang telah diuraikan, ternyata hasil yang diperoleh belum memuaskan pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan produksi terus dilakukan. Pada tahun 1832 Residen Cirebon B.J. Elias mengusulkan pola baru industri indigo. Pola baru yang diusulkan residen Cirebon itu ialah tanaman indigo di tanam di tanah-tanah sawah yang terletak di desa petani penanam dan kemudian memproduksinya indigo itu akan dibina oleh pabrik-pabrik besar yang dekat dengan desanya. Hasil produksinya akan dibeli oleh pemerintah dengan harga f1,5 per pon Amsterdam (Fernando, 1982:78-83).

Pola baru itu nampaknya dilaksanakan pada awal tahun 1833. Dengan pola baru itu, tanah-tanah persawahan subur yang tadinya ditanami padi atau tanaman pangan lainnya yang terdapat di kampung-kampung, mulai dijadikan sebagai areal penanaman indigo. Sawah yang ada di kampung-kampung itu digunakan secara bergantian dengan pola penanaman padi dan indigo. Dengan demikian, maka areal penanaman indigo di Kabupaten Cirebon menjadi semakin luas. Puncaknya terjadi tahun 1840 dengan peningkatan yang sangat tajam, yaitu mencapai 348% dari tahun 1832 dengan areal yang mencakup 3.784 bau (2.685,3 ha).

Pada masa puncak itu, distrik yang terlibat dalam penanaman indigo di Kabupaten Cirebon berjumlah enam distrik, yaitu Distrik Cirebon, Plumbon, Beber, Mandirancan, Lossari, dan Sindang Laut. Dengan jumlah desa sebesar 241 desa atau 66,4% dari seluruh desa di Kabupaten Cirebon.

Sejalan dengan meningkatnya areal penanaman, meningkat pula jumlah pabrik indigo. Pabrik-pabrik kecil didirikan di kampung-kampung dengan biaya dari kampung itu. Puncaknya terjadi tahun 1840 dengan jumlah 77 pabrik, sehingga menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai kabupaten terbanyak di Karesidenan Cirebon yang memiliki pabrik indigo.

Setelah tahun 1840 kelangsungan industri indigo di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan. Areal penanaman mengalami pengurangan dan begitu pula dengan pabrik-pabrik yang berproduksi. Berkurangnya areal penanaman indigo ini antara lain disebabkan tingginya harga padi setelah tahun 1840. Hal ini mengakibatkan pemerintah meninggalkan perluasan areal penanaman indigo (Fasseur, 1992:70). Tanah-tanah yang seharusnya mendapat giliran ditanami indigo, tidak ditanami tanama tersebut, tetapi kembali ditanami padi pengurangan luas areal tanaman semakin besar ketika muncul kebijakan

**Industri Indigo di Kabupaten Cirebon Pada Masa Sistem Tanam Paksa (1830-1870)
(Awaludin Nugraha dkk.)**

Gubernur Jenderal J.J. Rochussen untuk mengurangi areal penanaman indigo di Jawa tahun 1847 karena dianggap sudah tidak menguntungkan lagi dan kemudian diganti dengan industri gula.

Ketika kebijakan tersebut diberlakukan, areal penanaman indigo di Kabupaten Cirebon hanya tinggal 53% dari luas tahun 1840, yaitu tinggal 2.000 bau (1.419,3 ha) yang terletak di Distrik Plumbon, Beber, dan Mandirancan. Luas areal tersebut industri indigo hanya terdapat di Distrik Mandirancan. Luas areal tersebut semakin menurun sampai pada akhirnya dihapuskan tahun 1864. Pada tahun tersebut industri indigo hanya terdapat di Distrik Mandirancan dengan luas areal penanaman 363 bau (256,6 ha).

Berkurangnya areal penanaman seperti yang telah diuraikan juga berimbas pada jumlah pabrik yang memproduksi. Banyak pabrik yang ditutup karena kurang produktif. Ketika tanam paksa indigo dihapuskan di Kabupaten Cirebon tahun 1864, jumlah pabrik indigo hanya tinggal tujuh pabrik. Ketujuh pabrik itu kemudian dikembalikan kepada penduduk dan oleh penduduk pabrik-pabrik itu banyak yang dirobohkan.

Tenaga kerja yang diperlukan untuk industri indigo diperoleh dari penduduk desa di sekitar areal penanaman dan pabrik dengan menggunakan saluran tradisional yang telah ada dalam masyarakat desa, yaitu ikatan desa. Pada masa awal industri indigo di Kabupaten Cirebon, setiap baunya rata-rata dikerjakan oleh 17 keluarga (Fernando, 1982:109). Apabila setiap keluarga petani terdiri dari lima orang, maka dalam satu bau areal penanaman indigo dikerjakan oleh 85 orang. Setiap orang rata-rata mengerjakan 83 m². Keadaan itu berubah ketika pola industri baru dijalankan. Pada tahun pertama pelaksanaan industri indigo dengan pola baru, setiap bau tidak lagi dikerjakan oleh 17 keluarga, tetapi menurun menjadi sembilan keluarga (45 orang). Jadi setiap orang rata-rata mengerjakan 158m². Dengan demikian, pada pola industri baru petani harus mengerjakan areal indigo yang luasnya dua kali lebih luas dibandingkan masa pola industri lama. Jumlah petani yang mengerjakan penanaman indigo per bau itu semakin menurun pada masa berikutnya. Pada tahun 1840, yaitu pada masa puncak industri indigo di Kabupaten Cirebon, setiap baunya hanya dikerjakan oleh lima keluarga petani (25 orang). Jadi setiap orang rata-rata mengerjakan 284 m². Hal ini tentu akan semakin menambah beban bagi petani.

Selain bertambahnya luas areal yang harus dikerjakan oleh setiap orangnya, jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menanam dan mengurus tanaman indigo juga memperberat beban yang sudah berat. Jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk menanam dan merawat tanaman indigo 2-3 kali lebih banyak daripada tanaman padi. Jika tanaman padi memerlukan 1.207 jam per bau atau 241 hari kerja per bau. Maka tanaman indigo memerlukan 3.621 jam per bau atau 724 hari kerja per bau (untuk ukuran satu hari kerjasama dengan lima jam) (Surojo, 1990:231). Dengan jumlah sebesar itu, maka setiap keluarga petani minimal hari bekerja di areal penanaman sebesar 114 hari kerja. Dengan perincian 40 hari kerja untuk penanaman dan 74 hari kerja untuk perawatan dan

panen. Di samping itu mereka juga harus bekerja di pabrik untuk mengolah hasil panen menjadi bahan pewarna. Pekerjaan pengolahan itu minimal memerlukan 13 hari kerja. Jadi satu keluarga petani minimal harus bekerja dalam industri indigo sebesar 154 hari kerja (Suroyo, 1990:267)

Akibat dari hari kerja yang besar itu, mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menanam padi, yaitu tanaman yang menjadi bahan konsumsi mereka. Mereka hanya punya kesempatan menanam padi satu kali dalam satu tahun, sehingga tidak dapat mencukupi konsumsinya. Mereka pun tidak dapat mencukupi konsumsi mereka melalui upah yang diterima karena sangat kecil dan tidak mencukupi untuk melangsungkan hidup mereka. Sebagai ilustrasi dari upah yang diterima mereka, pada tahun 1840 petani indigo mendapat upah sebesar f 78,48 per bau per tahun. Setelah dikurangi pajak tanah sebesar f 41,56, para petani mendapat "sisa upah" sebesar f 36,92 per bau per tahun atau f 7,38 per keluarga per tahun. Jumlah ini merupakan jumlah terbaik selama industri indigo dijalankan di Kabupaten Cirebon. Dengan "sisa upah" sebesar itu satu keluarga petani dapat membeli beras yang paling murah sebanyak 7,38 pikul (455.8 kg). Apabila satu keluarga petani terdiri dari lima orang, maka per orang hanya mengkonsumsi 91,16 kg beras per tahun. Jumlah yang dikonsumsi per orang itu, jika dikomporasikan dengan kriteria kemiskinan yang dikemukakan Sayogyo, maka petani penanam dan pembuat indigo termasuk ke dalam kategori sangat miskin. Meskipun terdapat "sisa upah", namun belum tentu "sisa upah" tersebut diterima keluarga petani seluruhnya, karena ada kemungkinan dipotong oleh kepala desa.

Di lain pihak, para pejabat pribumi menerima pendapatan dari industri indigo yang jauh lebih besar dari para petani. Mereka tidak mendapat upah, tetapi memperoleh premi dari indigo yang dihasilkan. Premi ini juga diberikan kepada para pejabat Belanda di daerah. Pejabat pribumi yang mendapat premi dari industri indigo adalah bupati, patih, wedana, dan kepala desa, serta mandor lapangan yang biasanya dari golongan sikep. Pejabat Belanda yang mendapat premi pada mulanya hanya *kontoleur*, tetapi pada perkembangan selanjutnya asisten residen dan residen pun mendapatkannya. Sebagai gambaran pendapatan para pejabat di Kabupaten Cirebon dari industri indigo ini, pada tahun 1835 Bupati Cirebon mendapat f 3.767,6 per tahun. Sementara para petani tidak mendapat apa-apa dari industri tersebut, bahkan harus mengeluarkan uang tambahan untuk membayar pajak tanah sebesar f 4,36 per bau per tahun atau 54,5 sen per keluarga per tahun. Kemudian pada masa puncak industri indigo di Kabupaten Cirebon tahun 1840, Bupati Cirebon mendapat f 14.703,04 per tahun, sedangkan satu keluarga petani hanya mendapat 0,05 % dari apa yang diperoleh bupati, yaitu sebesar f 7,38 per tahun.

Selain pejabat pribumi, Kerajaan Belanda juga mendapat keuntungan dari industri indigo ini, bahkan lebih besar dari pejabat pribumi. Pada produksi pertama tahun 1831, Belanda memperoleh 1,5 ton dengan nilai f ton dengan nilai f 4.530. Jumlah itu kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada

tahun 1833 dihasilkan 23,3 ton dengan nilai f 70.642,5; dan pada tahun 1840 yang merupakan masa puncak industri indigo di Kabupaten Cirebon dihasilkan 90,8 ton dengan nilai f 336.332. Seiring dengan menurunnya luas areal penanaman setelah tahun 1840, produksi indigo mengalami penurunan juga. Ketika kebijakan untuk mengganti tanaman indigo dengan tebu diberlakukan tahun 1847, produksi indigo di Kabupaten Cirebon menurun menjadi 22,1 ton dengan nilai f 81.307. Pada tahun 1850 dihasilkan 13,4 ton dengan nilai f 40.734. Antar tahun 1852 sampai 1863, produksi indigo di Karesidenan Cirebon berfluktuasi antara 2,2 ton (f 6.750) sampai 3,6 ton (f 10.875). Pada tahun 1864 produksi indigo menurun sangat tajam hingga tinggal 692.5 kg dengan nilai (f 2.102,4) Jadi selama industri indigodijalankan di Kabupaten Cirebon (1830-1864), pemerintah Belanda mendapat indigo minimal 200 ton dengan nilai f 607.177.

KESIMPULAN

Produksi indigo secara paksa di Kabupaten Cirebon pada masa Sistem Tanam Paksa berhasil dijalankan oleh pemerintah local Belanda dan pribumi. Keberhasilan itu terutama terjadi pada dasa warsa pertama Sistem Tanam Paksa dengan titik kuminasi pada tahun 1840. Setelah itu, produksi indigo secara bertahap terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh semakin tidak bergairahnya pejabat Belanda dan pribumi di Kabupaten Cirebon untuk memproduksi indigo karena ada komoditas lain yang lebih menjanjikan keuntungan daripada indigo. Komoditas yang dimaksud adalah gula. Ketidakbergairahan ini dibuktikan dengan semakin dipersempitnya areal penanaman indigo dan dikurangnya beberapa distrik yang sangat produktif, sehingga tinggal satu distrik yang tetap berproduksi dan distrik yang dan distrik ini pun bukan termasuk ke dalam distrik sangat produktif.

Bagi Kerajaan Belanda industri indigo di Kabupaten Cirebon ini memberikan keuntungan yang cukup besar, sehingga dapat mengatasi kesulitan keuangannya dan bahkan dapat membiayai pembangunan kerajaan kerajaan tersebut. Keuntungan itu dapat diperoleh dengan cepat dan murah. Hal ini dimungkinkan karena mereka bekerja sama dengan para pejabat local pribumi di Kabupaten Cirebon. Sebagai konsekuensinya, para pejabat local pribumi di kabupaten tersebut juga merasakan keuntungan dari industri tersebut. Di lain pihak, industri tersebut sangat merugikan dan menyengsarakan petani di kabupaten tersebut. Mereka hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya kesenjangan ekonomi antara penduduk desa yang kaya dengan petani yang miskin menjadi semakin lebar.

Dengan demikian, maka Kabupaten Cirebon telah dijadikan sebagai daerah satelit untuk mencari keuntungan ekonomi oleh Kerajaan Belanda yang bertindak sebagai negara metropolis dan pemilik modal, yang dalam hal ini modalnya berupa kekuasaan bukan materi. Juga tepat seperti apa yang dikatakan J.C Baud bahwa Hindia (Indonesia) adalah "gabus tempat Kerajaan Belanda mengapung".

DAFTAR PUSTAKA

- Bleeker, P. 1865. "Bijdragen tot de Kennis van het Landelijk Stelsel op Java: Het Kultuurstelsel in Verband met het Landdelijkstelsel", dalam TNI, Tweede deel, 3 de Jaargang.
- Boke, J.H. 1983, *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Burger, D.H. 162. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jilid I. Diterjemahkan oleh Prajudi Atmosedirdjo. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Campagne, J. van Lookeren. 1919. "Indigo", dalam Gorkom, K.W. van Gorkom, Oost-Indische Cultures. Derde Deel. Amstredam: J.H. De Bussy. Hal. 600-661.
- Ekadjati, Edi S. 1995. *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Fasseur, C. 1992. *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch and the Cultivation System*. Terjemahan R.E. Elson. Ithaca, New York: Cornell University.
- Fernando, R.M. 1982. *Peasants and Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the End of the First Decade of the Twentieth Century*. Ph.D. Dissertation. Melbourne: Monash University.
- Frank, Andre Gunder. 1969. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. New York: Modern Reader Paperbacks
- Gonggrijp, G. 1949. *Schets eener Economische Geschiedenis van Nederlandsch-Indie*. Haarlem: de Ervan F. Bohn.
- Graaf, S.de en D.G. Stibbe. 1918. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Tweede Deel."Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Heilbroner, Robert L. 1982. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium*. Jilid I Jakarta: Gramedia.
- Lekkerkerker, C. 1938. Land en Volk van Java. Eerste Deel. Batavia: J.B. Wolters.
- Mubyarto, 1986. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Raffles, Thomas Stamford, 19988. *The History of Java*, Vol.I & II. Singapore: Oxford University Press.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan Dharmono Hardjowijono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**Industri Indigo di Kabupaten Cirebon Pada Masa Sistem Tanam Paksa (1830-1870)
(Awaludin Nugraha dkk.)**

Suroyo, A.M. Djuliati 1990. *Kerja Wajib Sebagai Eksploitasi Kolonial: Perkembangan di Karesidenan Kedu 1800-1890*. Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Vlekke, Bernard H.M. 1967. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malayasia.

Vries, E.de. 1972. *Masalah-masalah Petani Jawa*. Djakarta: Bharatara.

Waal, E.de. 1845. "Indigo-cultuur en Vervaardiging", dalam *Indisch Magajin*. Tweede Twaalfstal, 11 en 12.